

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

Fatkhul Muin

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten
email : fatkhulmuin@untirta.ac.id/fatkhulmoen@gmail.com*

Abstrak

Kajian ini menganalisis sudut pandang hukum Islam sebagai bagian hukum nasional yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang mayoritas Islam. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang merupakan penduduknya beragama Islam dan dianggap memiliki rumpun keturunan yang sama, tetapi pada aspek lainnya bahwa pengaruh hukum di kedua negara memiliki perbedaan, di mana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law* sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum *Common Law*. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi sistem hukum kedua negara, bahkan bukan hanya pada aspek tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, sedangkan di Malaysia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui pengakuan negara terhadap agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam, sesuai artikel 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia.

Kata kunci: *politik hukum, Indonesia, Malaysia, hukum Islam, konstitusi*

Abstract

This study analyzes the viewpoint of Islamic law as a part of national law, where the part of society that cannot be separated from the Muslim majority state. Indonesia and Malaysia are two countries with Muslim majority population and are considered to have a same clump of lineage, but on the other aspects that influence the laws in the two countries they have differences, in which Indonesia is affected by the legal system of the Civil Law, while Malaysia is influenced by the legal system of Common Law. Such differences would affect the legal systems of both countries, not only in that aspect, but also will affect the Islamic laws in the countries which are predominantly Muslim. In Indonesia, the existence of Islamic law can enter through Pancasila and Article 29 paragraph 1 and 2 of the Indonesian Constitution, while in Malaysia the existence of Islamic law can enter through the state recognition of the official religion of Malaysia that is Islam, according to article 3 paragraph 1 of the Constitution of Malaysia.

Keywords: *legal policy, Indonesia, Malaysia, Islamic law, constitution*

A. Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang dalam persepektif kultural dan keagamaan memiliki kesamaan, yaitu Islam sebagai agama mayoritas. Perbedaan yang ada pada kedua negara tersebut adalah bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dimana secara umum bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan sedangkan negara Malaysia merupakan federasi yang terbagi dalam negari-negeri yang dipimpin oleh sultan pada setiap negeri. Sedangkan dalam bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dan Malaysia bentuk pemerintahannya monarki konstitusional.

Di Indonesia, berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hukum Islam sudah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah negara Pancasila.¹ Bahwa hukum Islam ini diakui sebagai hukum Tuhan dapat dilihat dari pernyataan Noel J. Coulson, dimana dikatakan "does not grow out of....an avolving society as it the case with system but is imposed from above...".²

Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai negara yang mayoritas Islam, maka pandangan Syafi'i Ma'arif, sebagai berikut:³

"Bila ada kelompok umat yang paling merasakan rahmat kemerdekaan di Indonesia, maka kelompok itu adalah umat Islam menjadi penghuni mayoritas nusantara. Kemerdekaan bagi mereka adalah salah satu esensi ajaran agamanya sebagai pancaran tauhid, suatu faham monoteistik yang amat sejati. Begitu luhurnya nilai kemerdekaan itu bagi mereka, maka bila ada pihak lain yang

ingin menggonggonya, maka umat Islam tanpa diperintah siapapun, akan tampil ke depan untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi kemerdekaan antara 1945-1949 menunjukkan betapa heroiknya umat Islam bersama golongan lain maju berkuah darah dalam menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Betapa tinggi nilai kemerdekaan itu, dapat kita baca pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan. "Maka adalah tugas pemerintah dan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan, antara lain dengan kerja "mencerdaskan kehidupan bangsa", dan kerja mencerdaskan itu adalah kerja pendidikan. Bila dikaitkan dengan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa hanya umat yang cerdaslah yang akhirnya akan mampu mendaratkan pesan-pesan al-Qur'an yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia."

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam dibawa oleh sudagar muslim dari Timur Tengah. Seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di meda menyimpullkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 M dan sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum yang berlaku dikalangan masyarakat adalah hukum adat yang masing-masing sangat majemuk, di samping pengaruh agama Hindu yang sangat kuat tertanam di Jawa.⁴

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang, seiring dengan masuk, tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. tanpa memasuki wilayah kontroversi apakah Islam di Indonesia memasuki Indonesia pada abad ke-VII menurut sumber ke-Islaman, atau abad XIII dalam versi Barat, hukum Islam memiliki periodisasi yang setidaknya dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Kenyataan ini dipahami dan diakui oleh pejabat Belanda, seperti Van den Berg. Dari sisi ini kemudian dimunculkan *teori receptio in complexu*. Diantara bukti-bukti dapat dikemukakan misalnya, dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa “sengketa waris antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum rakyat yang digunakan sehari-hari.”⁵
2. Hukum Islam diberlakukan apabila ia telah diterima oleh hukum adat. Karena hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam adalah hukum adat. Jadi, hukum adalah yang menentukan berlakunya hukum Islam.⁶
3. Hukum adat berlaku apabila diresepsi oleh hukum Islam. Jadi, yang menentukan berlakunya atau tidaknya hukum adat adalah hukum Islam. Dengan kata lain hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam (*teori receptio exit*).⁷

Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mulai membuang politik kolonial dan dapat terlihat tonggak-tonggak sejarah sendiri salah satunya dalam bidang Peradilan Agama, yaitu:⁸

1. Pada tahun 1951, dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, LN 1951-9, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961, LN 1963-1, Peradilan

Agama diakui eksistensi dan perannya;

2. Pada tahun 1957, dengan Peraturan Pemerintah 1957, LN 1957-99, yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, didirikan/dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diluar Jawa-Madura;
3. Pada tahun 1964, dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, LN 1964-107, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, LN 1970-74, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu empat lingkungan Peradilan Negara yang sah;
4. Pada tahun 1974 terbit Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN-1, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, LN 1975-12, dimana segala jenis dalam bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan.
5. Pada tahun 1977 terbit Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, LN 1977-38 yang memberikan kekuasaan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara di bidang Perwakafan Tanah Milik.

Sedangkan Malaysia mempunyai dua pendekatan dalam pelaksanaan hukum syarak. Pertama dengan tidak memberikan ketentuan aturan undang-undang dan kedua dengan perundangan yang boleh diatur oleh mahkamah. Kebanyakan tuntutan hukum syarak dilaksanakan oleh orang Islam tanpa diatur undang-undang seperti berkaitan dengan Sholat dan haji.⁹ Kedudukan hukum Islam di Malaysia sendiri memiliki tempat tersendiri, sehingga kedudukan hukum Islam menjadi berkembang.

Di Malaysia, eksistensi Mahkamah Syariah di tingkat negeri dan pusat yang bertugas mengadili dan memutuskan setiap persoalan pelaksanaan perundangan Islam. Semua

keputusan yang dikeluarkan hakim yang terlibat dan putusnya berdasarkan kepada pelbagai akta dan enakmen Islam yang ditetapkan oleh pihak kerajaan.¹⁰ Selain itu, dalam rangka untuk melaksanakan hukum Islam di Malaysia, maka keberadaan Jabatan Kemajuan Islam¹¹ sebagai lembaga yang menegakan hukum Islam di Malaysia.

B. Politik Hukum Terhadap Hukum Islam di Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu pengakuan yang rendah hati dan penuh rasa syukur bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa”. Pengakuan ini mencerminkan sikap relegius para pendiri bangsa yang dalam pergulatan panjangnya dengan berbagai kesulitan untuk mencapai kemerdekaan.¹² Dengan kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa nilai-nilai relegius tereduksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peran besar umat Islam sebagai agama mayoritas yang mendorong terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran besar umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia, maka tidak terlepas dari cita-cita umat Islam membangun hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Dari sisi politik hukum, Ismail Suny berpandangan bahwa hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi kedalam dua periode, sebagai berikut:¹³

1. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dimana dalam hukum konstitusi dikenal *persuasive-source* dan *authoritative source*. Sumber persuasif ialah sumber yang orang harus diyakinkan untuk menerimanya. Dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan belakunya Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta, teori resepsi yang dasar hukumnya IS

maka dengan tidak berlakunya lagi IS dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, teori resepsi kehilangan dasar hukumnya. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia diterima oleh hukum adat.

2. Barulah dengan ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *authoritative source*, sumber autoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekedar sumber persuasif.

Sebagai negara yang berlandaskan kepada hukum, eksistensi hukum Islam di di Indonesia merupakan transformasi rill dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun berdasarkan kepada prinsip-prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan dan kemanusiaan. Kristalisasi prinsip-prinsip ini termuat dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *pertama*, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; *kedua*, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *ketiga*, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; keempat, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁴

Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dari

kesadaran, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia sehari-hari.¹⁵ Sebagai nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia, maka Pancasila digali dan pondasi dasar dari setiap pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Selain itu, menurut Abdul Kadir, bahwa dalam alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, mengungkapkan makna relegius dan makna moral. Dalam makna relegius terungkap pengakuan bangsa Indonesia mengenai kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan sebagai Prima kuasa, yang di dalamnya terkandung “*atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”.¹⁶ Dua hal tersebut diatas mengandung politik hukum pada aspek fundamental sebagai acuan dalam merumuskan legislasi hukum Islam di Indonesia.

C. Politik Hukum Terhadap Hukum Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dimana dalam konstitusi Malaysia pada artikel 3 ayat (1) disebutkan bahwa agama resmi persekutuan adalah agama Islam. Kalimat tersebut memberikan makna bahwa sebagai agama resmi, Islam memiliki porsi yang lebih dalam sistem hukum di Malaysia. Dalam artikel 3 konstitusi Malaysia tersebut, sebagai berikut ini :

- 1) *Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation.*
- 2) *In every State other than States not having a Ruler the position of the Ruler as the Head of the religion of Islam in his State in the manner and to the extent acknowledged and declared by the Constitution, all rights, privileges, prerogatives and powers enjoyed by him as Head of that religion, are unaffected and unimpaired;*

but in any acts, observance or ceremonies with respect to which the Conference of Rulers has agreed that they should extend to the Federation as a whole each of the other Rulers shall in his capacity of Head of the religion of Islam authorize the Yang di-pertuan Agong to represent him.

- 3) *The Constitution of the States of Malacca, Penang, Sabah and Sarawak shall each make provision for conferring on the Yang di Pertuan Agong shall be Head of the religion of Islam in that State.*
- 4) *Nothing in this Article derogates from any other provision of this Constitution.*
- 5) *Notwithstanding anything in this Constitution the Yang di-Pertuan Agong shall be the Head of the religion of Islam in the Federal Territories of Kuala Lumpur and Labuan; and for this purpose Parliament may by law make provisions for regulating Islamic religious affairs and for constituting a Council to advise the Yang di-Pertuan Agong in matters relating to the religion of Islam.*¹⁷

Kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia telah membawa kepada polemik dalam menentukan samada Negara ini merupakan sebuah negara Islam ataupun sebuah negara sekular. Menurut Farid Suffian Shuaib, polemik ini berlanjutan semenjak daripada tahun 1957 hingga ke hari ini. Menurutnya lagi, untuk mensifatkan bahwa Perlembagaan Persekutuan sebagai sekular adalah sesuatu yang sulit, karena Islam telah diberikan peruntukan yang dominan dibandingkan agama-agama lain. Demikian juga sebaliknya

sulit untuk mensifatkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam karena tidak ada peruntukan dalam Perlembagaan yang menjelaskan bahawa Islam sebagai undang-undang utama negara yang menjadi asas kepada pembentukan negara Islam. Sekiranya di negara Malaysia mempraktikkan Islam sebagai mencakupi keseluruhan aspek kehidupan, maka Negara ini adalah merupakan sebuah negara Islam. Namun sekiranya Islam hanyalah ditekankan dalam aspek ibadat semata-mata, maka Malaysia bukanlah sebuah negara Islam.¹⁸ Kondisi tersebut menjadi bagian perdebatan tersendiri dalam praktik hukum Islam di Malaysia.

Terdapat tiga institusi yang terlibat dalam pelaksanaan perundangan Islam yaitu Majelis Agama Islam, Mufti, dan Mahkamah Kadi (Mahkamah Syariah). Bagaimanapun, dalam artikel ini hanya akan menyentuh aspek perundangan Islam yang ditadbir oleh Mahkamah Syariah dan yang telah dikanunkan oleh badan perundangan iaitu Parlemen dan Dewan Perundangan Negeri. Undang-undang pentadbiran perundangan Islam yang dipakai oleh negeri-negeri termasuk Wilayah-wilayah Persekutuan telah mengalami beberapa pindaan dan tujuannya adalah untuk menjadikannya lebih lengkap dan relevan. Perlembagaan Persekutuan dalam Jadual Kesembilan Senarai 2, Senarai Negeri menyatakan perkara-perkara berhubung dengan hukum syarak yang terletak pada Badan Perundangan Negeri untuk menggubalnya termasuk kuasa menubuhkan Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang Islam. Mahkamah tersebut tidak boleh mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali apa-apa yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Terdapat banyak undang-undang Persekutuan yang menghadkan bidang kuasa dan pemakaian undang-undang negeri.¹⁹

Pada dasarnya ketentuan yang terdapat dalam pelembagaan persekutuan dalam

Jadual Kesembilan Senarai 2, menggambarkan bahwa ketentuan peraturan-perundang-undangan bagi persekutuan atau negara-negara bagian, maka berlaku dengan ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya., hal tersebut dapat dilihat dari Jadual Kesembilan, Senarai II, Fasal 1, yang memperuntukkan:

“Kecuali mengenai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuklah hukum Syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, kesahatarafan, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat; Wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat agama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat yang dijalankan kesemuanya sekali dalam Negeri; adat istiadat Melayu; Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan, penyusunan dan acara bagi mahkamah-mahkamah Syariah, yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang

menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam; menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu.”

Ini menggambarkan bahwa dalam jadual Kesembilan Senarai II, adanya pembatasan-pembatasan terhadap kedudukan hukum Islam di Malaysia yang tidak dapat berkembang secara luas, walaupun pada aspek lain dinyatakan bahwa agama resmi persekutuan merupakan agama Islam. Kedudukan Islam sebagai bagian dari hukum di Malaysia pada satu aspek dapat berkembang dengan cepat, karena dasar dalam konstitusi Malaysia secara konkrit menempatkan Islam sebagai agama resmi. Ini dapat dimaknai bahwa keberadaan Islam tidak hanya sebatas sebagai agama saja, tetapi hakikatnya dapat di pahami lebih luas didalamnya termasuk hukum yang ada di dalamnya.

Dalam perkembangan hukum Islam di Malaysia, baik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan pada tingkat negeri yang telah diundangkan di Malaysia, antara lain:

1. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1952 dan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 untuk Negeri Selangor.
2. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1955 dan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam untuk Negeri Terengganu.
3. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1956 dan Enakmen

Pentadbiran Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu 1982 untuk Negeri Pahang.

4. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1959 untuk Negeri Pulau Melaka.
5. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1959 untuk Negeri Pulau Pinang.
6. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1963 dan Enakmen Mahkamah Syariah 1983 untuk Negeri Kedah
7. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1965 untuk Negeri Perak.
8. Enakmen Mahkamah Syariah dan Hal Ehwal Suami Istri 1966, Enakmen Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu 1966, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1983 dan Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982 untuk Negeri Kelantan.
9. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1964 untuk Negeri Perlis.
10. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1978 untuk Negeri Johor.
11. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1977 untuk Negeri Sabah.
12. Undang-undang Mahkamah Orang Melayu Serawak 1915 dan Ordinan Majlis Agama Islam 1978 untuk Negeri Serawak.
13. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1960 untuk Negeri Sembilan.²⁰

Kesemua enakmen-enakmen negeri tersebut dilaksanakan pada tingkat negeri dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat negeri-negeri di Malaysia dan dalam bidang pengawasan, maka dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam (JAIS).

D. Konstruksi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki basis penduduk yang mayoritas beragama Islam, sehingga kedudukan hukum Islam menjadi penting untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional bagi Indonesia dan Malaysia. Dari aspek konstitusi, tentu apabila dilihat, bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, telah menyatakan bahwa adanya kebebasan beragama dan setiap orang dapat menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya, sedangkan dalam konstitusi Malaysia artikel 3 sub artikel (1), bahwa agama resmi negara adalah agama Islam. Apabila dilihat dari kedua konstitusi negara tersebut, maka terlihat bahwa Indonesia tidak secara konkrit Islam sebagai agama resmi, tetapi Malaysia menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Kedua konstitusi

tersebut merupakan gambaran dasar dari kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.

Pada satu sisi, bahwa Indonesia tidak secara konkrit menyebutkan bahwa adanya kebebasan beragama tetapi tidak menempatkan satu agama sebagai agama resmi, tentu dengan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasiskan kepada agama, dari sehingga hukum Islam dapat berkembang dan menjadi hukum yang hidup dan menjadi salah satu sumber hukum. Pembukaan sedangkan di Malaysia, pada artikel 3 menjelaskan bahwa agama resmi negara adalah agama Islam, sehingga kedudukan sebagai agama resmi, maka hukum Islam dapat berkembang dan menjadi sumber hukum yang bersifat utama. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan di bawah ini :

Dasar Konstruksi Pembangunan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia

Indonesia	Malaysia
Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Preamble UUD NRI “Atas Berkah Rahmat Tuhan” Pasal 29 Ayat 1 dan 2	Konstitusi Malaysia Artikel 1-5 Jadual Sembilan Senarai II, Fasal 1. Enakmen Negeri-Negeri

Perbandingan ini menggambarkan dasar dalam pembangunan hukum Islam, baik di Indonesia dan Malaysia. Dasar tersebut sebagai konstruksi dasar, sehingga dengan hal tersebut akan memberikan kejelasan eksistensi hukum Islam baik di Malaysia dan Indonesia. Pelembagaan hukum Islam di Malaysia melalui Enakmen-Enakmen negeri-negeri, memperkuat kedudukan hukum Islam di Malaysia sebagai sistem hukum di Malaysia, dan di Indonesia pengaturan hukum Islam pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota belum dapat diatur secara khusus seperti di Malaysia, kecuali di Aceh yang secara tergas memiliki keistimewaan sehingga pembentukan perda syariah (Qanun) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 23 ayat (1), huruf a dan b, bahwa DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a). membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; b). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain. Dengan kewenangan tersebut, maka hukum Islam dapat dilaksanakan di Aceh.

E. Penutup

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki kemiripan demografi, ini terlihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam.

Dalam konteks implementasi hukum Islam, di mana kedua negara memiliki paradigma yang berbeda, di mana Indonesia yang secara eksplisit hanya menyebutkan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ketentuan UUD dan Kebebasan menjalankan agamanya dalam Pasal 29 UUD 1945, sedangkan Malaysia lebih implisit menyatakan bahwa dalam artikel 3 Konstitusi Malaysia agama resmi negara adalah agama Islam dan agama lainnya dapat berkembang, selain

itu keberadaan terhadap Jadual Sembilan Senarai II yang merupakan legalitas bagi berlakunya aturan yang bersifat syariah pada setiap negeri. Pada aspek lain, bahwa keberadaan enakmen-enakmen negeri yang mengatur permasalahan syariah diakui sebagai ketentuan yang mengatur umat Islam. Dari dua negara tersebut, ada dua gambaran besar terhadap konstruksi hukum Islam di kedua negara tersebut.

Catatan Akhir:

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 57.

² Noel J. Coulson, "The Concept Progress and Islamic Law" dalam Robert N. Bella (ed.), *Religion and Progress in Modern Asia*, hlm. 75, dalam Mohd Idris Ramulyo, *Ibid*.

³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), hlm. 9-10.

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 149, dalam Alaidin Koto, et.al. *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 192

⁵ Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosadakarya, 1991, hlm. 45, dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2011), hlm. 3.

⁶ *Ibid*.

⁷ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrano* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65-69, dalam *Ibid*, hlm. 3.

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), hlm. 2

⁹ Abdul Monir Yaacob, "Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian", *Jurnal Fiqh*, No. 6 Tahun 2009, hlm. 3.

¹⁰ Rahimin Affandi Abd. Rahim, et.al. "Konsep Fiqah Malaysia Dalam Perundangan Islam: Satu Penganalan", *Kajian Malaysia*, Vol. 28, No. 2, 2010, hlm. 10-11, dalam [http://web.usm.my/km/28\(2\)2010/KM%20ART%201\(1-38\).pdf](http://web.usm.my/km/28(2)2010/KM%20ART%201(1-38).pdf), diakses 04 September 2014.

¹¹ Dalam rangka menjalankan putusannya, dimana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JKIM), mengeluarkan berbagai Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, tentu hal tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, keberadaan MUI sebagai dan keberadaan Dewan Syariah Nasional sebagai pengawal hukum Islam di Indonesia. Lihat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia* (Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015).

¹² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Mizan, 2014), hlm. 11.

¹³ Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987), hlm. 5-6, dalam H. Rahmat Djatnika, et.al. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1994), hlm. 75-76. Selama 14 tahun, dari tanggal 22 Juni 1945 waktu ditanda tangannya *gentelment agrement* antara pemimpin nasionalis dan sekular dan nasionalis Islam pada tanggal 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan, kedudukan ketentuan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Para Pemeluknya" adalah *persuasive-source*. Sebagaimana semua hasil-hasil sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah *persuasive-source* bagi *ground-interpretatie* dari UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan juga merupakan *persuasive-source* dari UUD 1945.

¹⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm.138

¹⁵ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.

¹⁶ Abdulkadir Besar, *Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscaya Metoda Berfikir* (Jakarta : Pustaka Azhary, 2005), hlm. 62-63.

¹⁷ Constitution of Malaysia.

¹⁸ Farid Sufian Shuaib, *Powers and Jurisdiction of Syariah Courts in Malaysia*, (Petaling Jaya: Lexis Nexis Malaysia Sdn. Bhd., 2008), hlm, 28-30. Lihat juga kertas kerja yang telah dibentangkan oleh Abdul Aziz bin Bari, *Issues in Islamisation of Law in Malaysia* (International Conference on Harmonisation of Shariah and Civil Law, 20-23 Oktober 2003, Hotel Legend, Kuala Lumpur), 6-9, dalam Alias Azhar dan Mohammad Azam Hussain, "Perluasan Skop Undang-Undang Islam Di Malaysia: Aplikasi Dan Implikasinya", dalam *Jurnal Syariah*, Jil. 20, Bil. 2, hlm, 165-186, (Kualalumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012), hlm. 168-169.

¹⁹ Ahmad Mohamad Ibrahim, "Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia" (Kuala Lumpur: IKIM, dalam Abdul Monir Yaacob, *Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian*, *Jurnal Fiqh*, No. 6 Tahun 2009, hlm. 5.

²⁰ Abdul Halim El-Muhammady, *Undang-Undang Jenayah Dalam Islam dan Enakmen-Enakmen Negeri*, cet. 2. (Selangor : Wadah Niaga Sdn. Bhd, 2005), hlm 138-139.

DAFTAR PUSTAKA

Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhar, Alias dan Mohammad Azam Hussain. "Perluasan Skop Undang-Undang Islam Di Malaysia: Aplikasi Dan Implikasinya", dalam *Jurnal Syariah*, Jil. 20, Bil. 2, Kualalumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012.

Constitution of Malaysia (Pelembagaan Malaysia).

Besar, Abdulkadir. *Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Idiologik, Niscaya Metoda Berfikir*. Jakarta : Pustaka Azhary, 2005.

Djatnika, Rahmat, et.al. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan*

Pembentukannya. Bandung: Remaja Rosadakarya, 1994.

El-Muhammady, Abdul Halim. *Undang-Undang Jenayah Dalam Islam dan Enakmen-Enakmen Negeri*. Selangor: Wadah Niaga Sdn. Bhd, Selangor Malaysia, 2005.

Koto, Alaidin, et.al. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan, pancasila Dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan, 2014.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurispudensi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. *Kompilasi Pandangan Hukum, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*. Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015.

Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pres, 1996.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Rahim, Rahimin Affandi Abd., et.al. "Konsep Fiqah Malaysia Dalam Perundangan Islam: Satu Pengenalan", *Kajian Malaysia*, Vol. 28, No. 2 Tahun 2010, dalam [http://web.usm.my/km/28\(2\)2010/KM%20ART%201\(1-38\).pdf](http://web.usm.my/km/28(2)2010/KM%20ART%201(1-38).pdf). diakses 07 September 2014.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2011.

Yaacob, Abdul Monir. “Perlaksanaan Perundangan Islam di Malaysia: Satu Penilaian”, dalam *Jurnal Fiqh*, No. 6 Tahun 2009.

